

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan memiliki makna sebagai suatu hal yang tidak sebagaimana mestinya terjadi. Sedangkan, pendapatan bermakna sebagai total penerimaan seluruh sektor ekonomi yang dihitung dalam jangka waktu tertentu (BPS, 2020). Menurut Todaro dan Smith (2011), ketimpangan pendapatan adalah kondisi dimana total pendapatan nasional tidak didistribusikan sama rata kepada masyarakat. Sehingga ketimpangan pendapatan dapat dikatakan sebagai besarnya perbedaan pendapatan antara masyarakat kelompok kaya dengan masyarakat kelompok miskin.

Angka ketimpangan dapat diketahui dari rasio empat puluh persen tingkat pendapatan masyarakat ekonomi rendah terhadap total pendapatan seluruh masyarakat. Angka kesenjangan pendapatan yang terlalu tinggi dapat berdampak pada munculnya berbagai macam masalah sosial dan ekonomi di suatu negara seperti krisis finansial, kriminalitas, meningkatnya angka kemiskinan dan sebagainya.

Masalah ketimpangan pendapatan menjadi suatu masalah serius di banyak negara sedang berkembang, salah satunya negara Indonesia. Menurut Putri dkk (2015), masalah ketimpangan pendapatan tidak dapat dihapuskan, namun hanya dapat diturunkan hingga tingkat yang mampu

diterima suatu sistem sosial agar tetap selaras dengan proses pertumbuhannya.

Pada tahun 2017, Indonesia menjadi yang terburuk di dunia dalam kesenjangan pendapatan antara penduduk miskin dan kaya (INFID, 2017). Menurut lembaga independen Oxfam Indonesia dan *International NGO Forum on Indonesia Development*, tingginya kesenjangan pendapatan di Indonesia tahun 2017 disebabkan oleh beberapa faktor berikut ini:

1. Fundamentalisme pasar yang mengakibatkan keuntungan dari pertumbuhan ekonomi banyak diambil oleh orang kaya.
2. Peningkatan *Political Capture*, yaitu pemanfaatan pengaruh perubahan aturan yang dilakukan oleh orang kaya untuk mendapatkan keuntungan.
3. Ketidaksetaraan jenis kelamin.
4. Rendahnya gaji yang diperoleh sehingga mengakibatkan masyarakat bawah tidak dapat keluar dari masalah kemiskinan.
5. Perbedaan akses dan infrastruktur antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Penyebab terjadinya kesenjangan pendapatan di suatu daerah menurut Arsyad (2010) adalah sebagai berikut:

1. Penurunan pendapatan perkapita yang disebabkan oleh tingginya pertumbuhan penduduk.

2. Inflasi karena peningkatan pendapatan tanpa disertai dengan peningkatan jumlah produksi.
3. Pembangunan antar daerah yang tidak merata.
4. Banyaknya investasi pada proyek padat modal yang mengakibatkan peningkatan jumlah pengangguran.
5. Rendahnya mobilitas sosial.
6. Diberlakukannya kebijakan industri substitusi impor yang berdampak pada peningkatan harga barang industri sebagai perlindungan bagi usaha milik golongan kapitalis.
7. Menurunnya kurs perdagangan antara negara berkembang dengan negara maju sebagai dampak dari ketidakelastisan permintaan barang-barang ekspor oleh negara maju kepada negara sedang berkembang.
8. Melemahnya industri kerajinan masyarakat.

2.1.2 Indikator Pengukuran Ketimpangan Pendapatan

Menurut Todaro dan Smith (2011), untuk tujuan analitis dan kuantitatif para ekonom biasanya membagi dua ukuran utama dalam distribusi pendapatan menjadi distribusi pendapatan perseorangan dan distribusi pendapatan fungsional. Selain itu juga terdapat beberapa indikator dalam mengukur ketimpangan pendapatan yang akan dijabarkan berikut ini.

1.) Distribusi Pendapatan Perseorangan

Distribusi pendapatan perorangan (*personal distribution of income*) yang disebut juga sebagai distribusi ukuran pendapatan (*size distribution of income*) menjadi ukuran yang banyak diterapkan para ahli ekonomi. Yang dihitung dalam pengukuran ini hanya jumlah penghasilan perorangan maupun rumah tangga, sementara cara dalam mendapatkan penghasilan tersebut tidak dipersoalkan. Aspek yang paling penting adalah seberapa besar pendapatan dari setiap orang ataupun rumah tangga tanpa mempersoalkan darimana sumber penghasilan tersebut diperoleh. Disamping itu, jenis lokasi (kota atau desa) dan jenis pekerjaan dari sumber pendapatan juga diabaikan (Todaro dan Smith, 2011).

2.) Distribusi Pendapatan Fungsional

Distribusi pendapatan fungsional (*functional distribution of income*) yang disebut juga sebagai distribusi pendapatan pangsa faktor (*factor share distribution of income*) merupakan pengukuran yang fokus pada total pendapatan nasional yang didapat oleh setiap faktor produksi, antara lain tenaga kerja, lahan dan modal. Yang dipersoalkan dalam teori ini yaitu persentase keseluruhan pendapatan tenaga kerja yang dibandingkan dengan total pendapatan (dalam persen) yang didistribusikan dalam wujud uang sewa, laba ataupun bunga. Meskipun orang-orang tertentu mampu menerima pendapatan dari semua sumber tersebut, hal ini tidak

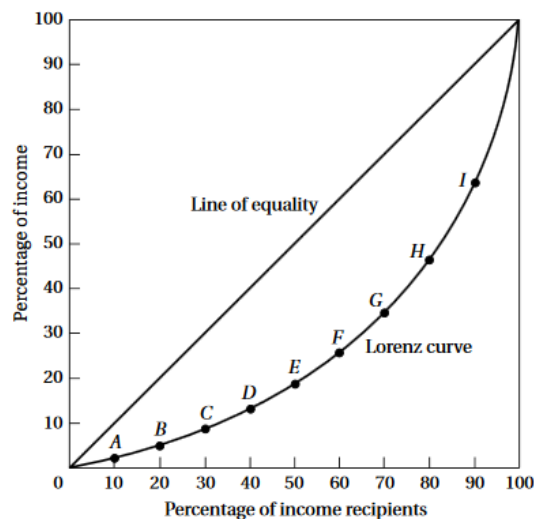
dipermasalahan pada distribusi fungsional (Todaro dan Smith, 2011).

3.) Kurva Lorenz

Kurva Lorenz adalah kurva yang menggambarkan hubungan kuantitatif secara nyata antara persentase penerimaan pendapatan dan persentase total pendapatan dalam jangka waktu tertentu (Todaro dan Smith, 2011). Kurva Lorenz dikenalkan pertama kali pada tahun 1905 oleh seorang ilmuwan statistika Amerika Serikat yang bernama Conrad Lorenz. Distribusi pendapatan yang semakin timpang ditunjukkan dengan jarak kurva Lorenz yang menjauhi garis diagonal atau garis pemerataan sempurna. Kasus ekstrim dari ketidakmerataan yang sempurna dapat terjadi jika semua pendapatan nasional hanya diperoleh satu orang saja. Kondisi tersebut dapat ditunjukkan oleh kurva Lorenz yang menghimpit sumbu vertikal di sebelah kanan dan sumbu horizontal di sebelah bawah. Oleh sebab itu, pemerataan maupun ketimpangan sempurna dalam distribusi pendapatan tidak pernah diperlihatkan oleh negara manapun. Sehingga setiap negara mempunyai kurva Lorenz di sisi kanan garis diagonal seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.1.

Semakin lurus kurva Lorenz dan semakin mendekati diagonal mengindikasikan bahwa akan semakin rata distribusi pendapatan nasional. Sementara, kurva Lorenz yang melengkung di

dekat sumbu horizontal bawah menunjukkan ketimpangan pada distribusi pendapatan nasional.



Sumber: Todaro dan Smith (2011)

Gambar 2.1 Kurva Lorenz

4.) Indeks Gini

Indeks Gini merupakan pendekatan atau ukuran ketidakmerataan ekonomi yang paling sering digunakan (Kuncoro, 2010). Corrado Gini adalah nama pencipta Indeks Gini melalui bukunya yang berjudul “*Variabilità e mutabilità*” tahun 1912. Koefisien Gini merupakan kelanjutan dari kurva Lorenz. Perhitungan Indeks Gini diperoleh dari perhitungan luas daerah antara kurva Lorenz dan garis diagonal dibandingkan dengan luas kotak setengah persegi dimana kurva Lorenz berada.

Nilai indeks Gini berada di rentang angka nol (0) hingga satu (1). Nilai indeks Gini sebesar nol (0) menunjukkan bahwa seluruh pendapatan telah didistribusikan ke seluruh masyarakat secara

merata (*perfect equality*), sementara nilai indeks gini sebesar 1 berarti bahwa seluruh pendapatan di suatu daerah hanya diperoleh satu unit atau satu orang saja (*perfect inequality*) (Kuncoro, 2010). Berikut rumus untuk menghitung koefisien Gini:

$$\text{Indeks Gini} = 1 - \sum_{i=1}^k \frac{p_i (Q_i + Q_{i-1})}{10.000}$$

Keterangan:

k : Jumlah kelas pengeluaran yang dibentuk

P_i : Persentase penduduk kelas pengeluaran ke-i

Q_i : Persentase kumulatif jumlah pengeluaran kelas pengeluaran ke-i

Tingkat ketimpangan pendapatan dibagi ke dalam lima kategori (Sastra, 2017), yakni tingkat ketimpangan pendapatan dibagi menjadi lima kategori yakni: ketimpangan sangat rendah (indeks Gini <0,2); ketimpangan rendah (indeks Gini 0,2-0,39); ketimpangan sedang (indeks Gini 0,4-0,59); ketimpangan tinggi (indeks Gini 0,6-0,79); dan ketimpangan sangat tinggi (indeks Gini 0,8).

5.) Menurut Bank Dunia

Ketimpangan pendapatan menurut Bank Dunia dapat dihitung melalui persentase rasio jumlah pendapatan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah terhadap total pendapatan penduduk. Berikut

merupakan indikator ketimpangan yang telah ditetapkan oleh Bank Dunia.

Tabel 2.1 Indikator Ketimpangan menurut Bank Dunia

Klasifikasi	Distribusi Pendapatan
Ketimpangan Tinggi	40% penduduk berpendapatan rendah menerima $< 12\%$ dari total pendapatan.
Ketimpangan Sedang	40% penduduk berpendapatan rendah menerima $12\% - 17\%$ dari total pendapatan.
Ketimpangan Rendah	40% penduduk berpendapatan rendah menerima $> 17\%$ dari total pendapatan.

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012

2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan Produk Nasional Bruto (PNB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tanpa melihat struktur ekonomi yang berubah (Arsyad, 2010:11-12). Kuznet (dalam Jhingan, 2014:57) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan kemampuan jangka panjang suatu negara dalam menyediakan aneka macam produk ekonomi yang semakin bertambah untuk masyarakatnya. Terdapat tiga komponen utama dari definisi tersebut, yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dinilai dari bertambahnya persediaan jenis komoditas.

2. Kemajuan teknologi yang digunakan dapat menentukan tingkat kemampuan menyediakan berbagai komoditas bagi masyarakat.
3. Teknologi yang digunakan secara luas dan efektif perlu dikoordinasikan dalam ranah ideologi dan kelembagaan agar dapat memanfaatkan secara optimal inovasi yang telah diciptakan.

Pertumbuhan ekonomi juga bermakna sebagai kegiatan ekonomi yang semakin berkembang dan mengakibatkan penambahan komoditas jasa hasil produksi masyarakat. Peningkatan tersebut diakibatkan oleh faktor-faktor produksi yang kuantitas serta kualitasnya semakin meningkat, investasi yang meningkatkan volume barang modal, serta perkembangan teknologi yang dipergunakan. Selain itu juga dikarenakan pertambahan jumlah tenaga kerja yang diakibatkan oleh perkembangan penduduk, pengalaman kerja, serta pendidikan yang meningkatkan keterampilan para tenaga kerja (Sukirno, 2011:9-10).

Pertumbuhan ekonomi daerah dapat diketahui dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sementara pertumbuhan ekonomi nasional dapat diketahui dari Produk Domestik Bruto (PDB). PDRB atau PDB ini akan menampilkan jumlah akhir nilai komoditas dari seluruh unit ekonomi di suatu negara (BPS, 2020). Data pertumbuhan ekonomi dapat diperoleh melalui publikasi data yang telah tersedia di BPS masing-masing daerah. Selain itu, data pertumbuhan ekonomi di suatu daerah juga dapat diperoleh dari perhitungan rumus berikut ini:

$$Y_{it} = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

Y_{it} = Pertumbuhan Ekonomi di suatu daerah pada tahun t (Persen)

$PDRB_t$ = PDRB di suatu daerah pada tahun t (Rupiah)

$PDRB_{t-1}$ = PDRB di suatu daerah pada tahun $t-1$ (Rupiah)

2.1.4 Derajat Desentralisasi Fiskal

Diterapkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (PKPD) pada tanggal 1 Januari 2001 menjadi awal mula penerapan otonomi dan desentralisasi fiskal di Indonesia. Akan tetapi kedua peraturan tersebut telah diperbaiki berulang kali hingga menjadi UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (PKPD) serta UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Haryanto, 2015).

Desentralisasi menurut UU No. 32 Tahun 2004 didefinisikan sebagai kekuasaan yang diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan pada sistem NKRI. Dengan demikian desentralisasi fiskal merupakan proses penyerahan anggaran oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah guna mendukung fungsi serta tugas pemerintahan dalam melayani masyarakat sesuai kewenangannya.

Desentralisasi fiskal menjadi komponen utama dalam desentralisasi. Dukungan dari sumber-sumber keuangan seperti pendapatan asli daerah, dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana

pinjaman atau subsidi dari pemerintah sangat diperlukan bagi Pemerintah Daerah untuk mendapatkan kebebasan dalam mengambil keputusan pada sektor publik serta efektivitas dalam menjalankan fungsinya.

Banyaknya kekayaan budaya dan adat istiadat dari setiap daerah di Indonesia menjadikan desentralisasi sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Sehingga, tujuan pemerintah pusat memberikan kebijakan desentralisasi fiskal adalah supaya pemerintah daerah mampu menjalankan fungsinya dengan baik sebagai daerah otonom. Untuk mengetahui tingkat kemandirian fiskal suatu daerah dapat diketahui melalui derajat desentralisasi fiskal (DDF) kepada daerah tersebut yang dapat dihitung menggunakan formula berikut ini:

$$\text{DDF (\%)} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

Menurut tim Fisipol UGM (dalam Wahab dkk., 2016:4), terdapat enam kriteria (skala interval) dalam menentukan derajat desentralisasi fiskal yang akan ditampilkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi Fiskal (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,01	Baik
>50,00	Sangat baik

Sumber: Tim Fisipol UGM (dalam Wahab dkk., 2016:4)

2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka

Masalah pengangguran terbuka masih banyak terjadi karena memang belum memperoleh pekerjaan meskipun telah berusaha semaksimal mungkin. Selain itu, pengangguran terbuka juga diakibatkan oleh penambahan tenaga kerja yang tidak diimbangi dengan penambahan lowongan pekerjaan. Penurunan kegiatan ekonomi serta penggunaan teknologi modern yang lebih banyak daripada penggunaan tenaga kerja manusia juga menjadi penyebab tingginya pengangguran terbuka di suatu daerah.

Menurut Sukirno (2011:328), yang disebut sebagai pengangguran terbuka ialah penduduk usia kerja yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan. Untuk mengetahui tingkat kesempatan bekerja, digunakanlah rumus tingkat pengangguran terbuka yakni persentase pengangguran terhadap total angkatan kerja (BPS, 2020). Pengangguran jenis ini juga dapat didefinisikan sebagai persentase penduduk yang

memulai usaha atau sedang mencari kerja, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan, serta mereka yang telah memiliki pekerjaan namun belum memulainya (BPS, 2020).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan angka yang mengukur jumlah penduduk yang menganggur per seratus penduduk kelompok angkatan kerja. Dasar penetapan pengangguran jenis ini adalah seluruh pencari pekerjaan, baik yang baru mencari kerja maupun yang sudah memiliki pekerjaan sebelumnya. Tenaga kerja yang dikategorikan setengah pengangguran (*underemployment*) merupakan tenaga kerja yang masih mencari pekerjaan dan yang bekerja dibawah 35 jam dalam sepekan. Sementara, tenaga kerja dapat dikategorikan sebagai setengah pengangguran parah (*severely underemployment*) apabila bekerja dibawah 25 jam dalam sepekan (BPS, 2020).

Pengangguran terbuka pada umumnya dialami oleh penduduk usia muda yang baru lulus dari perguruan tinggi maupun dari sekolah menengah. Mereka cenderung memilih pekerjaan sesuai dengan gelar yang dimilikinya. Pekerjaan yang diinginkan oleh sebagian besar generasi muda adalah di sektor modern atau perkantoran di daerah perkotaan yang aktivitas industrinya tinggi. Mereka rela menunggu lebih lama untuk mendapatkan pekerjaan itu daripada bekerja di sektor lain yang dianggap kurang menjanjikan. Keadaan tersebut akan dapat meningkatkan tingkat pengangguran terbuka di kota atau kawasan industri cenderung lebih tinggi daripada yang terjadi di daerah dengan kegiatan ekonomi yang masih

bertumpu pada sektor pertanian. Pada umumnya masyarakat daerah dengan tingkat pendidikan yang rendah akan bersedia bekerja apa saja untuk menopang kehidupannya. Tidak hanya di sektor pertanian saja, mereka juga bersedia untuk bekerja di kantor informal tanpa mempedulikan jam kerja yang panjang atau pendapatan yang rendah. Menurut mereka yang terpenting adalah mendapat penghasilan untuk bertahan hidup.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Yenni Del Rosa dan Ingra Sovita (2016)	Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Pulau Jawa	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis data panel dengan model FEM. • Variabel Dependen: Ketimpangan distribusi pendapatan. • Variabel Independen: PDRB perkapita, populasi penduduk, TPT dan DDF. 	PDRB perkapita, populasi penduduk, tingkat pengangguran terbuka dan derajat desentralisasi fiskal secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa.
2.	Rifki Khoirudin dan Jannatul Liutammima Musta'in (2020)	Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Model regresi data panel menggunakan data sekunder. • Variabel Dependen: Ketimpangan pendapatan. • Variabel Independen: Pertumbuhan 	Tingkat pengangguran terbuka dan upah minimum kab/kota berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ketimpangan pendapatan, sementara pertumbuhan

			Ekonomi, Tingkat pengangguran, Desentralisasi Fiskal dan Upah Minimum	ekonomi dan desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi DIY tahun 2012-2018.
3.	Liling Vera Yusica, Nazaruddin Malik dan Zaenal Arifin (2018)	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi dan Tingkat Pengangguran Terhadap Ketimpangan Antar Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Model regresi data panel menggunakan data sekunder. • Variabel Dependen: Ketimpangan wilayah. • Variabel Independen: Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi dan Tingkat pengangguran. 	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah serta variabel aglomerasi dan tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah.
4.	Vinnie Aulya (2016)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2007-2013	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis data panel dengan model regresi <i>fixed effect</i>. • Variabel Dependen: Ketimpangan pendapatan. • Variabel Independen: Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Belanja Modal 	Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan. Kemudian Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan.
5.	Fazen Hesi Araja, Hadi Sasana, dan Gentur Jalunggono (2017)	Analisis Tingkat Ketimpangan Pendapatan di	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini menggunakan alat <i>Indeks Entrophy Theil</i> dan analisis 	Variabel IPM, inflasi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif

		Kabupaten Bekasi	<p>regresi data panel menggunakan <i>FEM</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Variabel Dependen: Ketimpangan pendapatan. • Variabel Independen: IPM, Inflasi, Pertumbuhan ekonomi, dan tingkat kemiskinan. 	<p>terhadap ketimpangan pendapatan sementara tingkat kemiskinan tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Namun, secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.</p>
6.	Dewi Septiani Dwi Kusuma, Sudati Nur Sarfiah, dan Yustirania Septiani (2019)	Analisis Pengaruh PDRB, Inflasi, dan IPM terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi DIY Tahun 2011-2017.	<ul style="list-style-type: none"> • Model regresi data panel dengan bantuan program <i>Eviews 9</i>. • Variabel Dependen: Ketimpangan pendapatan. • Variabel Independen: PDRB, inflasi, dan IPM. 	<p>Secara parsial dan simultan variabel PDRB, inflasi, dan IPM memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di DIY.</p>
7.	Morzeta Nemati dan Ghasem Raisi (2015)	<i>Economic Growth and Income Inequality in Developing Countries</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Metode analisis data panel. • Variabel Dependen: Ketimpangan pendapatan. • Variabel Independen: Pertumbuhan ekonomi. 	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sesuai hipotesis Kuznets pada tahap awal pertumbuhan, ketimpangan pendapatan meningkat.</p>
8.	Ferdinand Niyimbanira (2017)	<i>Analysis of the Impact of Economic Growth on</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis regresi data panel dengan <i>FEM</i>. 	<p>Pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi tingkat kemiskinan, namun</p>

		<i>Income Inequality and Poverty in South Africa: The Case of Mpumalanga Province</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Dependen: Ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. • Variabel Independen: Pertumbuhan ekonomi. 	tidak dapat mengurangi ketimpangan pendapatan di kab/kota Provinsi Mpumalanga.
9.	Kashif Munir dan Maryam Sultan (2017)	<i>Macroeconomic determinants of income inequality in India and Pakistan</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis regresi data panel dengan model FEM. • Variabel Dependen: Ketimpangan pendapatan. • Variabel Independen: PDB perkapita, pengeluaran konsumsi pemerintah, tingkat kesuburan, penambahan nilai sektor pertanian, tanah subur per kapita, penduduk perkotaan, dan globalisasi. 	PDB per kapita, pengeluaran konsumsi pemerintah, tingkat kesuburan, penambahan nilai menurut sektor pertanian, tanah subur per kapita, penduduk perkotaan, dan globalisasi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di India dan Pakistan.
10.	Savitri Mariana Dyah (2012)	<i>The Impacts of Fiscal Decentralization on Income Inequality in Indonesia</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Metode OLS dan estimasi data panel dengan model FEM. • Variabel Dependen: Ketimpangan pendapatan. • Variabel Independen: Desentralisasi fiskal 	Desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya, desentralisasi fiskal yang lebih besar cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan.

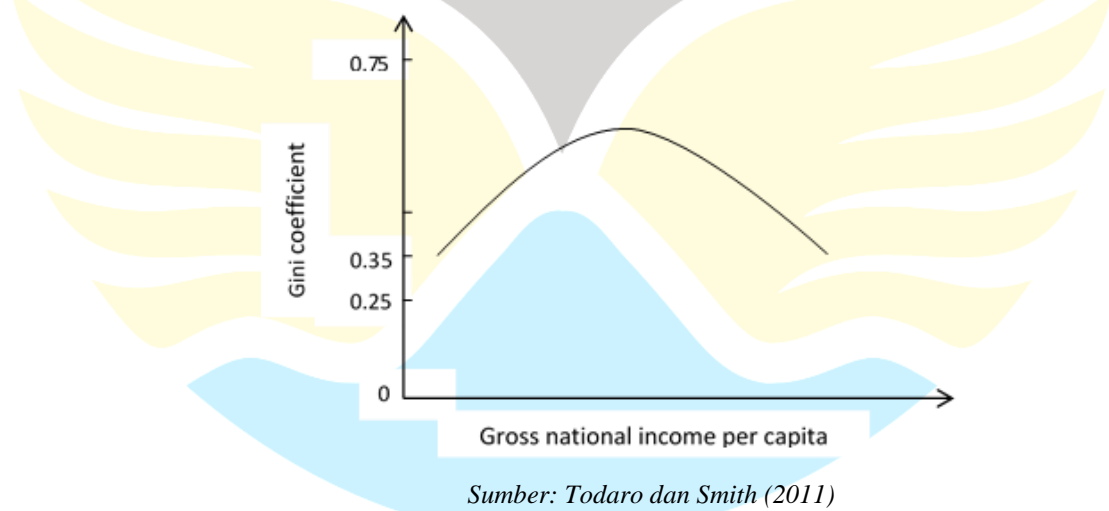
2.3 Kerangka Teoritis

2.3.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan

Dalam suatu proses pembangunan, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi menjadi dua pencapaian yang diharapkan mampu tercapai secara bersamaan. Pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai dengan pemerataan ekonomi dapat memperbesar kesenjangan di kelompok masyarakat, sedangkan pemerataan ekonomi yang tidak disertai dengan pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan kemiskinan yang semakin meningkat di suatu daerah (Zusanti dkk., 2018). Menurut Kuznets (dalam Tambunan, 2001) terdapat hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin besar ketimpangan antara si miskin dan si kaya. Hartini (2017) dalam penelitiannya juga menemukan adanya korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan pendapatan. Kondisi ini disebabkan oleh perbedaan penghasilan suatu sektor ekonomi yang dapat mengakibatkan ketimpangan pendapatan.

Menurut Simon Kuznet (dalam buku Todaro dan Smith, 2011) korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan dapat dijelaskan dengan hipotesis kurva “U-terbalik” pada Gambar 2.2. Pada tahun 1995 Kuznet mengemukakan bahwa awalnya kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menaikkan ketimpangan pendapatan.

Namun, peningkatan pendapatan justru akan menurunkan ketimpangan pendapatan setelah mencapai kondisi tertentu. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan kenaikan ketimpangan pendapatan di tahap awal pembangunan ekonomi. Namun saat pembangunan ekonomi mencapai titik stabil, ketimpangan pendapatan akan menurun. Gambar 2.2 memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif pada ketimpangan pendapatan dalam jangka pendek. Akan tetapi dalam jangka panjang, keduanya memiliki pengaruh yang negatif. Menurut Kuznets terdapat dua faktor penting yang mengakibatkan terjadinya masalah ketimpangan, yakni modal yang hanya berpusat pada kelompok berpenghasilan tinggi serta penduduk di sektor pertanian yang beralih ke sektor perindustrian.



Gambar 2.2 Kurva U-terbalik, Kuznet

2.3.2 Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap Ketimpangan Pendapatan

Salah satu alat untuk mengukur tingkat kemandirian daerah dan keberhasilan otonomi daerah dalam mengelola keuangan daerah adalah derajat desentralisasi fiskal. Derajat desentralisasi fiskal yang semakin tinggi akan berdampak pada meningkatnya pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk melayani masyarakat, sehingga pendapatan dan kesejahteraan masyarakat juga dapat meningkat.

Derajat desentralisasi fiskal yang meningkat secara bertahap di setiap daerah akan mampu mendorong pemerataan antar daerah. Pernyataan tersebut dapat dijelaskan melalui teori kutub pertumbuhan (Tarigan, 2004) yang menyatakan bahwa kutub pertumbuhan yang semakin banyak di suatu daerah akan dapat meratakan distribusi pendapatan di wilayah yang bersangkutan, sehingga semakin menurun angka ketimpangannya, meskipun daerah kumuh (*slum*) akan tetap ada. Akan tetapi kawasan kumuh tersebut akan menyusut ketika kutub-kutub pertumbuhan ekonomi yang baru semakin banyak.

Penelitian Abdillah dan Mursinto (2014) menghasilkan temuan mengenai adanya korelasi negatif signifikan antara desentralisasi fiskal dan ketimpangan ekonomi antar wilayah di Provinsi Jawa Timur. Artinya, peningkatan desentralisasi fiskal akan mampu menurunkan ketimpangan ekonomi antar daerah. Sementara, hasil penelitian Sianturi (2011) mengatakan bahwa derajat desentralisasi fiskal memiliki

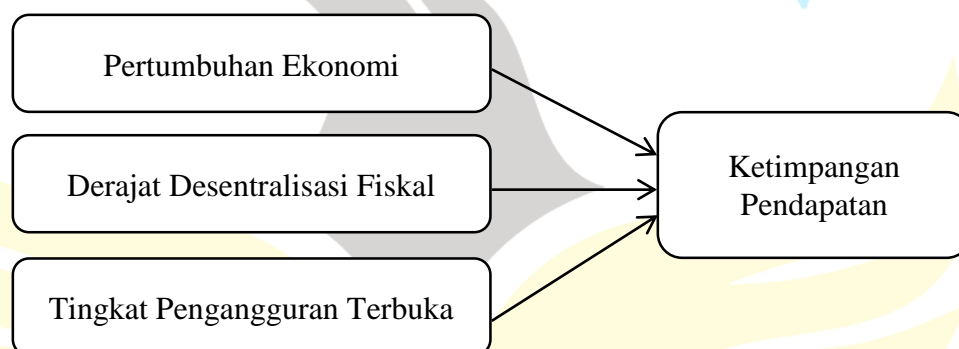
pengaruh yang positif pada kesenjangan pendapatan antar daerah di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini berarti bahwa derajat desentralisasi fiskal yang semakin tinggi akan dapat berkontribusi pada peningkatan ketimpangan pendapatan antar daerah. Hal tersebut diakibatkan oleh keberadaan wilayah yang jauh lebih maju dibandingkan wilayah lainnya.

2.3.3 Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Ketimpangan Pendapatan

Sukirno (2011) dalam bukunya menjelaskan bahwa semakin banyak orang yang menganggur, akan semakin banyak pekerja yang tidak memperoleh penghasilan. Banyaknya orang yang menganggur akan mengakibatkan penurunan upah tenaga kerja yang berpendapatan rendah sehingga dapat meningkatkan kesenjangan penghasilan. Selain itu, banyaknya jumlah pengangguran juga dapat mempengaruhi produktivitas suatu daerah yang nantinya berpengaruh pada penurunan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan kesenjangan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan penelitian Rosa dan Sovita (2016), ditemukan adanya korelasi positif signifikan antara tingkat pengangguran terbuka dan ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa. Semakin tinggi angka pengangguran di suatu daerah akan menyebabkan penurunan produktivitas dan penurunan ekonomi di suatu daerah, sementara daerah lain mengalami kenaikan tingkat kesejahteraan (Erwan dalam Yusica dkk., 2018). Hasil kajian IMF menunjukkan hubungan positif antara

pengangguran terhadap ketimpangan. Dimana kebijakan untuk mendukung pekerjaan serta penciptaan lapangan kerja yang berkualitas merupakan hal penting bagi negara berkembang untuk menurunkan ketimpangan serta mendorong pertumbuhan yang menyeluruh (Khoirudin dan Musta'in, 2020). Berdasarkan penelitian terdahulu serta tinjauan pustaka yang disebutkan di atas, kerangka teoritis penelitian ini mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, derajat desentralisasi fiskal, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan dapat disusun sebagai berikut:

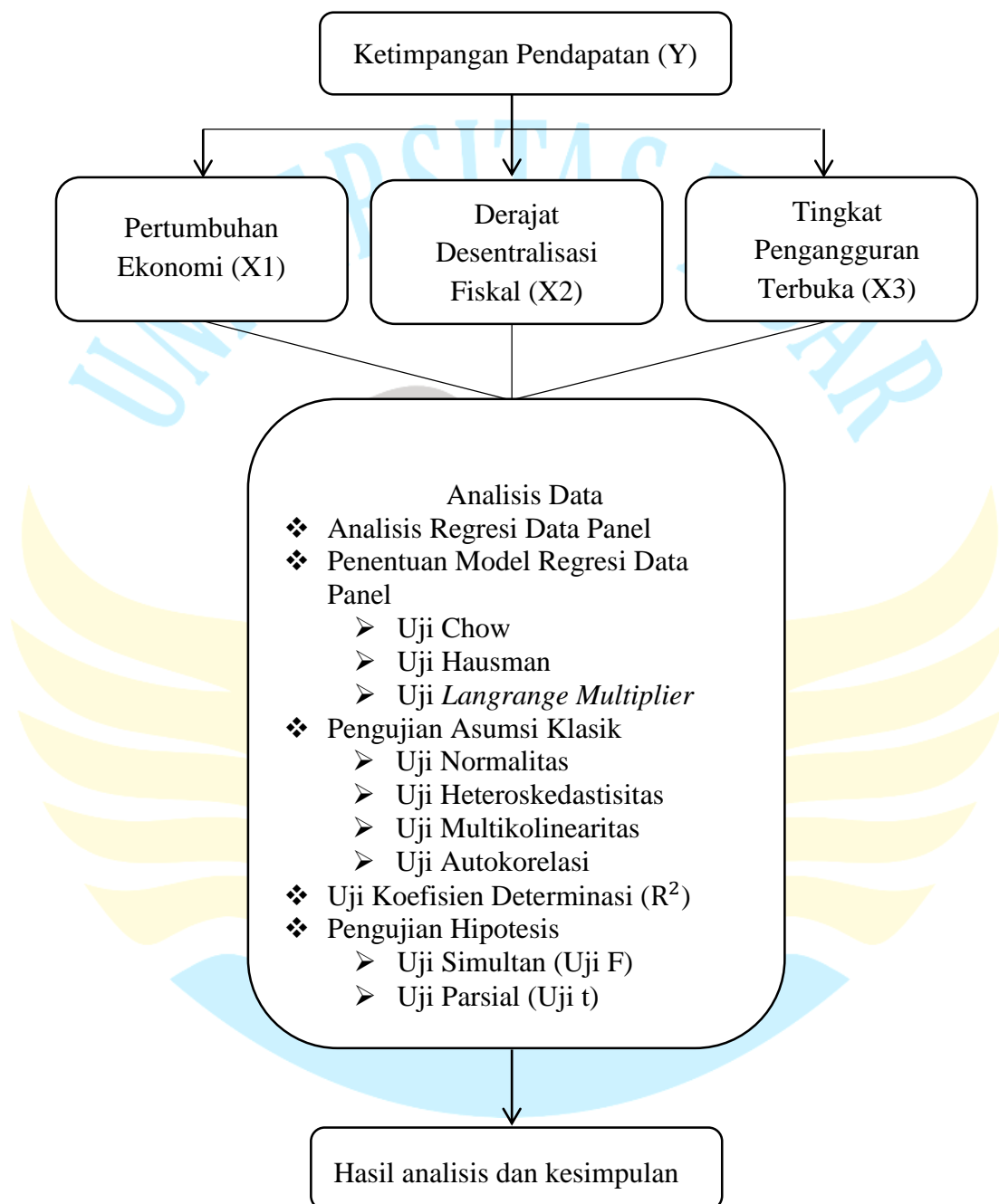


Gambar 2.3 Kerangka Teoritis Penelitian

2.4 Kerangka Berpikir Penelitian

Kerangka berpikir dalam suatu penelitian berguna untuk memecahkan serta menjawab hipotesis atau dugaan sementara yang ditemukan dalam penelitian. Pola alur pemikiran penelitian ini disusun secara sistematis berdasarkan kajian pustaka dan kerangka teoritis yang telah disebutkan sebelumnya. Adapun kerangka berpikir penelitian ini mengenai analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, derajat desentralisasi fiskal dan tingkat

pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi DIY tahun 2010-2019 adalah sebagai berikut:



Gambar 2.4 Kerangka Berpikir Penelitian

Berdasarkan kerangka berpikir penelitian pada Gambar 2.4, penulis akan mengidentifikasi tiga faktor sebagai variabel bebas (X) yang diprediksi berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan (Y) sebagai variabel terikat. Ketiga faktor tersebut yaitu pertumbuhan ekonomi (X1), derajat desentralisasi fiskal (X2) dan tingkat pengangguran terbuka (X3).

Langkah pertama dalam menganalisis data yaitu menentukan model regresi data panel yang paling sesuai untuk diaplikasikan pada penelitian ini, apakah menggunakan *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), atau *Random Effect Model* (REM). Penentuan model ini akan dilakukan menggunakan Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji *Lagrange Multiplier*. Setelah diperoleh model terbaik untuk regresi data panel, maka langkah berikutnya adalah menguji asumsi klasik yang terdiri dari uji Normalitas, uji Heteroskedastisitas, uji Multikolinearitas dan uji Autokorelasi.

Tahap berikutnya yaitu melakukan uji koefisien determinasi (R^2) dan uji hipotesis yang terdiri dari uji-F (uji simultan) dan uji-t (uji parsial). Setelah dilakukan pengujian pada masing-masing variabel, maka akan diperoleh hasil analisis yang selanjutnya dapat ditarik kesimpulan dari seluruh pengujian yang telah dilakukan.

2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis diartikan sebagai penjelasan sementara dari fenomena, atau keadaan tertentu yang akan atau telah terjadi (Mudrajat Kuncoro, 2013:59). Hipotesis merupakan pernyataan peneliti yang paling spesifik mengenai hubungan antar variabel penelitian. Hipotesis ini berfungsi sebagai acuan untuk

mengarahkan penelitian agar sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan kajian pustaka serta penelitian terdahulu, hipotesis berikut akan digunakan pada penelitian ini:

1. Diduga pertumbuhan ekonomi, derajat desentralisasi fiskal dan tingkat pengangguran terbuka secara simultan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi DIY tahun 2010-2019.
2. Diduga pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi DIY tahun 2010-2019.
3. Diduga derajat desentralisasi fiskal secara parsial berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi DIY tahun 2010-2019.
4. Diduga tingkat pengangguran terbuka secara parsial berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi DIY tahun 2010-2019.